



**BBM Naik, Segera Salurkan Bantuan Sosial secara Cepat dan Tepat Sasaran**

**P**emerintah secara resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) per Sabtu (3/9). Harga BBM jenis Pertalite yang sebelumnya dijual 7.650 naik menjadi Rp10.000, harga Solar dari Rp5.150 naik menjadi Rp6.800, sedangkan Pertamina dari sebelumnya Rp12.500 menjadi Rp14.500. Namun kenaikan harga BBM ini belum dibarengi dengan penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk keluarga miskin. Di DIY, hingga Minggu (4/9) bantuan sebagai bantalan ekonomi bagi warga kurang mampu ini belum disalurkan lantaran masih proses pencocokan data. Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial, Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Jogja, Supriyanto, mengatakan jajarannya belum menerima data keluarga penerima manfaat (KPM) yang berhak memperoleh bansos BBM di wilayahnya. Koordinasi dengan penyalur baru dilaksanakan Senin (5/9). Nantinya, bansos BBM akan disalurkan lewat Kantor Pos. Data tentang nama dan alamat KPM yang berhak menerima bantuan juga sepenuhnya berada di PT Pos selaku penyalur bantuan. Meski demikian, pemerintah memastikan warga miskin terdampak tetap memperoleh bansos yang akan disalurkan secara bertahap. Sebelumnya, Executive

General Manager Kantor Cabang Utama Pos Jogja, Fahdian Hasibuan, menyebut belum menerima data penerima bansos BBM di DIY dari Kemensos. Hanya saja koordinasi dan komunikasi telah dilakukan dengan pemkab/pemkot tiap wilayah, sehingga sewaktu-waktu penyaluran bisa dilaksanakan. Saat ini data penerima bansos BBM masih dicek ulang oleh Pemerintah untuk memastikan penerima tepat sasaran dan tidak tumpang tindih. Hal ini merupakan verifikasi rutin lantaran tidak semua penerima bansos kemungkinan kembali menerima bansos BBM karena berbagai sebab seperti penerima meninggal, menjadi tidak berhak, dan lain-lain.

Kenaikan harga BBM yang diberlakukan pemerintah pada akhir pekan kemarin memang tak bisa dihindari, terutama di tengah krisis energi dan pangan yang melanda sebagian besar negara di dunia. Bahkan boleh dikatakan, Pemerintah Indonesia sedikit lambat menaikkan harga BBM, karena sebagian besar negara lain sudah menaikkan harga sejak beberapa waktu lalu. Beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah yang mencapai lebih dari Rp500 triliun merupakan beban yang maha berat di tengah iklim investasi yang belum pulih sebagai dampak pandemi Covid-19. Agar kenaikan harga BBM ini tak terlalu memberatkan masyarakat, khususnya warga

miskin, maka penyaluran bansos harus segera dilakukan dengan cepat. Terlebih, seiring dengan naiknya harga BBM, saat ini harga kebutuhan pokok kini mulai merangkak naik. Bansos ini merupakan bantalan sosial yang harus segera diterima masyarakat. Kalau bantalan sosial siap dan BBM sudah naik, maka masyarakat bakal terbanting. Oleh karena itu, penyaluran bansos harus diprioritaskan. Pemerintah harus bergerak cepat, namun tetap harus cermat sehingga hanya warga yang benar-benar berhak yang bisa mendapatkannya. Jangan sampai penyaluran bantuan sosial ini salah sasaran dan justru dinikmati warga yang mampu.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005